

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARANA

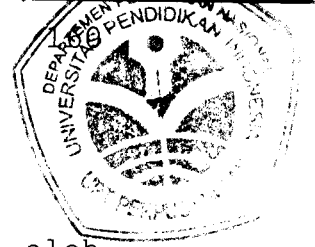
Berdasarkan hasil penelitian dengan pembahasan dan kajian teoritis yang relevan dengan fokus penelitian, maka diperoleh beberapa rumusan sebagai suatu kesimpulan. Setiap rumusan tersebut satu sama lainnya mengandung implikasi yang perlu diperhitungkan didalam menentukan langkah sebagaimana yang direkomendasikan.

A. Kesimpulan

Pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional baik secara internal maupun eksternal dalam sistim pengawasan yang ada pada prinsipnya sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. Kepala Dinas Pendidikan Kota dan para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dalam kedudukannya sebagai atasan langsung dalam melaksanakan tugasnya secara melekat telah melakukan pengawasan. Demikian juga aparat pengawasan dari Bawasda Kota Bandung yang berfungsi sebagai

pengawas fungsional dalam kedudukannya baik sebagai pengawasan internal maupun eksternal menunjukkan telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan fungsinya. Termasuk aparat dari Sub Bagian Perlengkapan dan Seksi Prasarana dan Sarana pada Dinas Pendidikan Kota serta Sub Seksi Prasarana dan Sarana pada Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan sesuai dengan fungsinya telah berperan dalam melakukan pengawasan. Dengan demikian semua aparat yang menduduki posisi jabatan dalam pengawasan terhadap inventarisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan pada SD Negeri di Kota Bandung secara keseluruhan telah berperan dan terlibat didalam suatu sistem pengawasan.

Walaupun semua aparat yang menduduki posisi jabatan dalam pengawasan tersebut telah berjalan dan berfungsi, namun didalam pelaksanaannya baru dikategorikan "Cukup". Jawaban dalam angket dari 60 responden menunjukkan 56,16% memilih jawaban "b" dengan jawaban yang digunakannya yaitu "Kadang-kadang melakukan pemeriksaan". Berdasarkan hasil pengamatan, prosentasi jawaban tersebut merupakan jawaban yang merata. Jawaban itu tidak berasal dari salah satu melainkan komplit dari semua unsur unit kerja, satuan kinerja, dan termasuk unsur pimpinan.



Pengawasan atasan langsung yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota dan para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan pada umumnya masih belum menunjukkan keseriusan dan berkesinambungan. Data yang diperoleh melalui angket menunjukkan 37% memeriksa inventarisasi dilaksanakan "tidak secara khusus". Bahkan "kadang-kadang" melakukan setiap tahun, yaitu 31%. Dengan demikian kesungguhan dan kesinambungan pengawasan dari unsur pimpinan masih berada pada kategori "Cukup" dan baru sebagian kecil menunjukkan pada kategori "Baik".

Dalam sistem pengawasan yang berjalan selama ini dalam melakukan langkah-langkahnya masih kategori lemah, terutama dalam melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan itu sendiri. Bila hasil pemeriksaan ternyata diperoleh temuan, misalnya berupa penyimpangan atau kelalaian tidak melaksanakan inventarisasi, dalam kenyataannya sering tidak dilakukan tindak lanjut. Selama ini belum menunjukkan adanya tindakan korektif yang tegas dan tepat terutama dalam pemberian sangsi. Sampai saat ini tindakan korektif hanya terbatas dilakukan yang sifatnya teguran lisan saja. Padahal tindakan korektif merupakan kunci efektivitasnya pengawasan. Bahkan melakukan pengawasan tanpa dilakukan

langkah tersebut sama halnya dengan tidak melakukan pengawasan. Melalui pengawasan diharapkan dapat meluruskan dan mengarahkan pelaksanaan inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan, arahan, dan petunjuk.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh setiap unsur dari Bawasda, pimpinan, dan staf masih kurang bersifat koordinatif. Satu dengan lainnya seakan-akan masih berjalan masing-masing. Sampai saat ini biasanya koordinasi hanya sebatas pemberitahuan melalui tembusan surat. Pada saat memulai pelaksanaan dan sesudah melakukan pemeriksaan biasanya jarang bahkan hampir tidak ada jalinan kerjasama. Sebelum mendatangi langsung ke SD Negeri tidak melakukan saling meminta informasi. Demikian juga sesudah melakukan pemeriksaan, tidak ada kegiatan untuk saling memberi informasi mengenai kondisi inventarisasi. Sesungguhnya kerjasama ini merupakan kegiatan yang dapat mengefektifkan pengawasan itu sendiri.

B. Implikasi

Berdasarkan temuan penelitian terdapat beberapa aspek dalam sistem pengawasan yang dapat memberikan implikasi secara khusus dalam kaitannya dengan inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri. Implikasi dari berbagai persoalan yang muncul adalah :

Dengan keberadaan berfungsi dan berjalannya pengawasan dari semua unsur pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional yang berkedudukan sebagai pengawasan internal dan eksternal, maka eksistensi pengawasan tetap berwibawa dan berpengaruh. Semua pihak khususnya Kepala SD Negeri tetap merasakan keberadaan pengawasan tersebut. Melihat fungsi dan kedudukan unsur-unsur yang melakukan pengawasan, maka sistem pengawasan yang ada bila ditingkatkan dan dikembangkan akan membawa ke arah yang lebih baik dalam inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan.

Dengan kondisi sistem pengawasan yang berjalan selama ini yang masih kategori "Cukup", membawa terciptanya kondisi inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri masih rendah. Pelaksanaan inventarisasi tersebut termasuk pada kategori kurang.

Kondisi ini harus ditumbuhkembangkan, sehingga dapat menciptakan sistem pengawasan yang kategori "Baik". Pada gilirannya dapat membawa kondisi inventarisasi ke arah yang lebih baik. Memang banyak cara yang dapat dilakukan agar inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan dapat berjalan dengan baik. Diantaranya melalui pengawasan yang baik akan membawa kondisi inventarisasi ke arah yang baik juga.

Belum adanya keseriusan dan kesinambungan pengawasan dari unsur pimpinan, maka tidak akan banyak permasalahan yang terungkap dalam pelaksanaan inventarisasi. Unsur pimpinan tidak akan banyak mengetahui berbagai penyebab dari setiap masalah yang timbul. Bahkan masalah yang ada dan terungkap, bila tidak ada keseriusan dari unsur pimpinan, maka masalah itu hanya dibiarkan tidak dipecahkan. Melalui pengawasan yang sungguh-sungguh dan berkesinambungan dari unsur pimpinan, maka pimpinan sendiri dapat mengetahui bagaimana kelengkapan fasilitas, tingkat keterampilan, dan tingkat disiplin pada pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi. Pimpinan yang baik berarti tidak melimpahkan pengawasan sepenuhnya kepada yang membantunya. Kinerja pengawasan yang serius dan berkesinambungan dari unsur pimpinan dapat menciptakan

sistem pengawasan ke arah yang lebih baik. Pada akhirnya juga pelaksanaan inventarisasi dapat menjadi ke arah yang lebih baik juga.

Masih lemahnya dalam melakukan langkah-langkah pengawasan terutama dalam tindakan korektif, maka akan mengendorkan efektivitas pengawasan. Kepala SD Negeri yang bertanggung jawab dalam inventarisasi, bila melakukan kelalaian dalam tugas tersebut akan merasa tidak ada resikonya. Dengan demikian tindakan korektif yang tepat dan tegas perlu ditingkatkan. Pada akhirnya agar setiap aset atau barang yang ada secara bertahap dapat diinventarisir secara teratur, sehingga dapat terhindar dari pemborosan, penyimpangan, dan penyalahgunaan prasarana dan sarana pendidikan.

Dengan kurangnya koordinasi dari semua aparat yang terlibat dalam sistem pengawasan, maka pengawasan menjadi kurang efektif. Bahkan pengawasan menjadi kurang efisien. Masing-masing unsur pelaksana pengawasan bisa saja bekerja tanpa koordinasi. Namun keberhasilan pengawasan belum tentu optimal, tetapi bisa saja pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya akan semakin besar. Koordinasi di dalam pengawasan bukan untuk menambah pekerjaan, melainkan justru dapat memperingan beban pekerjaan, sekaligus dapat

mengefektifkan pengawasan. Dengan koordinasi di dalam pengawasan dapat saling melengkapi informasi yang berarti dapat mengefektifkan pengawasan.

Berdasarkan uraian di atas, maka implikasi secara keseluruhan dalam sistem pengawasan pada kondisi sekarang akan membawa ke arah :

Pertama, citra aparat tenaga kependidikan akan menjadi kurang baik. Seolah-olah semua aparat, khususnya yang melakukan pengawasan terhadap inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan tidak secara profesional. Bila citra demikian ini terus berlanjut, maka tingkat kepercayaan terhadap kinerja aparat kependidikan akan menjadi semakin rendah.

Kedua, sistem pengawasan yang ada pada kondisi sekarang menjadikan inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri masih rendah. Pelaksanaan inventarisasi tersebut yang ada pada kondisi sekarang masih jauh dari yang diharapkan. Kondisi demikian menggambarkan masih belum tertibnya inventarisasi, yang akhirnya dapat menimbulkan pemborosan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan bukan sebatas untuk membiayai pengadaan dan perawatan prasarana dan sarana saja. Masih banyak kebutuhan

lainnya yang memerlukan pembiayaan. Di lain pihak mengenai sumber pembiayaan ini termasuk kategori terbatas bahkan langka yang terkadang dihadapkan pada posisi yang serba sulit.

Ketiga, pada akhirnya kondisi inventarisasi yang demikian akan membawa pengaruh yang kurang mendukung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Dalam penyelenggaraan pendidikan pada SD Negeri secara langsung atau tidak langsung serta lambat atau cepat akan berpengaruh terhadap ketidakberhasilan proses penyelenggaraan pendidikan. Apabila proses pendidikan menjadi demikian adanya, maka akan berpengaruh juga terhadap mutu pendidikan yang dicapai pada tingkat SD Negeri di Kota Bandung.

C. Saran

Bertitik tolak dari beberapa implikasi tersebut di atas, maka terdapat juga beberapa rekomendasi yang diasumsikan layak untuk dijadikan salah satu bahan masukan dalam penyempurnaan mengenai sistem pengawasan terhadap inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri di Kota Bandung.

Pertama, Perlu adanya peningkatan dan pengembangan sistem pengawasan. Semua unsur aparat dari Bawasda, pimpinan, dan Staf pelaksana pengawasan hendaknya meningkatkan kinerjanya, melalui cara :

- a. Pemeriksaan terhadap inventarisasi hendaknya minimal dilakukan setahun satu kali. Hal ini terutama berkaitan dengan setiap pergantian tahun pelajaran, biasanya sering terjadi perubahan keadaan barang. Perubahan itu bisa berupa penambahan atau perubahan posisi penempatan barang pada suatu ruangan.
- b. Meningkatkan profesionalisme pengawasan. Menambah pengetahuan, wawasan, dan keterampilan teknis pengawasan hendaknya dilakukan secara terus-menerus. Usaha ini dapat dilakukan secara pribadi atau melalui lembaga kedinasan, misalnya kursus, diklat, seminar, dan lain-lain.
- c. Menambah pengetahuan teknis inventarisasi. Setiap aparat pelaksana pengawasan, hendaknya berusaha menambah pengetahuan secara teknis mengenai inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan. Pengetahuan ini sangat menunjang terhadap keberhasilan dari maksud pengawasan. Usaha ini dapat dicapai melalui membaca buku, mengikuti penataran

khusus mengenai inventarisasi, bertanya, dan lain sebagainya.

Kedua, Perlu adanya tindakan korektif yang tegas. Tindakan ini hendaknya dilakukan pada saat diperoleh temuan dalam pemeriksaan. Temuan itu dapat berupa penyimpangan, penyalahgunaan barang, atau kelalaian dalam melaksanakan inventarisasi. Tindakan yang ditempuh, hendaknya :

- a. Tindakan korektif yang dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan hanya sebatas yang lalai dalam melaksanakan inventarisasi. Kepala Cabang berusaha menelusuri sebab-sebab terjadinya kelalaian tersebut. Kemudian membinanya secara terus menerus dan berkesinambungan.
- b. Tindakan korektif yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota diberikan kepada Kepala SD Negeri yang berulang-ulang melalaikan pembinaan atau arahan yang dibeikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan. Dalam batas-batas tertentu tindakan ini lebih bersifat administratif, misalnya berupa teguran tertulis.
- c. Tindakan korektif yang dilakukan oleh Walikota sebagai atasan Bawasda, yaitu bersifat sangsi

administratif. Misalnya memperhitungkan masa jabatan Kepala Sekolah pada SD Negeri tertentu.

Ketiga, perlu adanya koordinasi diantara unsur yang terlibat di dalam sistim pengawasan. Koordinasi diperlukan untuk mencari, memberi, dan memperoleh informasi mengenai pelaksanaan inventarisasi pada suatu SD Negeri. Koordinasi tersebut hendaknya dilakukan dengan cara :

- a. Aparat dari Bawasda pada saat sebelum melakukan pemeriksaan, pada saat pemeriksaan, dan sesudah pemeriksaan ke suatu SD Negeri, hendaknya terlebih dahulu hendaknya menghubungi :
 - 1) Dinas Pendidikan Kota.
 - 2) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
- b. Aparat dari Dinas Pendidikan Kota pada saat sebelum pemeriksaan, pada saat pemeriksaan, dan sesudah pemeriksaan terlebih dahulu hendaknya menghubungi Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
- c. Aparat dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan hendaknya koordinasi dengan Camat setempat sebagai langkah koordinatif.

Untuk lebih memperluas, mengembangkan, dan memperdalam bidang ilmu administrasi pendidikan, khususnya yang menyangkut sistem pengawasan dalam



lingkungan pendidikan, hendaknya perlu dilakukan

pengkajian lebih lanjut mengenai :

- a. Perlu adanya standar kerja sistem pengawasan yang dapat memacu terhadap terlaksananya inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan pada SD Negeri.
- b. Perlu adanya analisis jabatan pengawasan yang menjadi ruang lingkup tugas dan fungsi aparat Bawasda, Dinas Pendidikan Kota, dan Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
- c. Perlu adanya kebijaksanaan berupa Surat Keputusan Walikota. Kebijaksanaan ini menyangkut penetapan mengenai standar kerja dan analisis jabatan (a dan b) di atas, termasuk prosedur penanganan kasus, kewenangan, dan bentuk sangsi yang perlu dilakukan dalam tindakan korektif.

Demikian tesis ini yang uraiannya dituangkan mulai dari Bab Pertama hingga Bab Kelima sebagai bab terakhir. Uraian pada bab yang satu dengan bab-bab lainnya tidak bisa dipisahkan, melainkan satu kesatuan pola pikir dalam kontek "Sistem Pengawasan Terhadap Inventarisasi Prasarana dan Sarana Pendidikan pada SD Negeri di Kota Bandung".

